

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Mekanisme akuntabilitas dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Dalam hal ini untuk memenuhi terwujudnya sektor publik yang akuntabel, mekanisme akuntabilitas harus memiliki dimensi akuntabilitas yaitu, akuntabilitas hukum dimana akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukan dan peraturan yang ditetapkan. Akuntabilitas proses dimana akuntabilitas ini terkait dengSsan apakah proses yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah terlaksana cukup baik atau belum dalam pemberian pelayanan, pengawasan hingga pemeriksa untuk menghindari terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme(Djalil, 2014). Sebagaimana dipaparkandalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dijelaskan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan keberhasilan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* berkaitan dengan pertanggung jawaban pimpinan atau keputusan dan hasil yang dicapai sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi serta,akuntabilitas program yaitu apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak dan akuntabilitas kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Lembaga pemerintah yang berakuntabilitas publik

berarti lembaga tersebut senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamati oleh rakyat. Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol mempunyai rasa tanggung jawab besar untuk kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan kelompok atau golongan saja.

Dari segi untuk mengimplementasikan terdapat pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan pasal 20 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, di antaranya yaitu asas akuntabilitas menyatakan bahwa setiap tindakan dan kinerja pemerintah, wajib untuk di pertanggung jawabkan. Baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berada di atasnya. Peranan pemerintah dalam keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan atau program sangatlah penting. Pemerintah memegang peranan dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan.(Utami, 2014)

Akuntabilitas itu sendiri tidak hanya diperlukan bagi pemerintah saja akan tetapi juga bagi masyarakat. (Waluyo, 2015) akuntabilitas bagi masyarakat seharusnya dibarengi dengan adanya sarana yang sama bagi seluruh masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Jika akses ini diberikan oleh pemerintah maka sarana tersebut bisa dimanfaatkan untuk berperan serta dalam melakukan kontrol. Pada dasarnya, landasan utama proses penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah akuntabilitas. Karena itu, aparatur harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik.

Akuntabilitas juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab mengenai apa yang telah, sedang dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik (Mahmudi,2009:9). Kenyataannya bahwa untuk mencapai sebuah keberhasilan pemerintah yang akuntabel harus memiliki prinsip – prinsip. Mampu menyajikan informasi

penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional.

Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah (mahmudi, 2014). Kondisi sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai, hal ini terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa seperti, tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif, sehingga menimbulkan citra pemerintah yang kurang baik. Sehubungan dengan isu akuntabilitas tersebut, para pejabat publik dituntut untuk meningkatkan kinerjanya secara sungguh-sungguh agar dalam memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan secara benar.

Beberapa metode untuk menegakkan akuntabilitas antara lain yaitu, kontrol legislatif yaitu dimana legislatif melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan melalui diskusi dan sejumlah komisi didalamnya, jika komisi tersebut dapat berfungsi secara efektif maka dapat meningkatkan kualitas pembuatan keputusan dan mengawasi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah melalui investigasi dan menegakkan kinerja. Dengan alasan itu pula Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagai salah satu daerah yang memiliki keistimewaan dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya dan memiliki kebudayaan yang kental dituntut untuk selalu menerapkan nilai-nilai kearifan lokal.

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan publik dapat ditegakkan melalui struktur pemerintah yang terdesentralisasi dan partisipasi. Kontrol administratif internal, serta media masa dan opini publik, efektivitas berbagai metode dalam menegakkan akuntabilitas tergantung tingkat dukungan media masa dan opini publik, adapun faktor yang aktual dari media masa dan opini publik yaitu, pelaksanaan berbagai tugas pemerintah harus transparan. Bahwa informasi yang dihasilkan pemerintah seharusnya dapat diakses secara luas oleh masyarakat tanpa akses informasi tersebut, masyarakat tidak akan menyadari apa yang sepenuhnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Sehingga salah satu yang penting bagi saat ini yaitu adalah desa, desa sebagai salah satu instrument pemerintahan yang penting yang diwajibkan memiliki prinsip akuntabilitas adapun dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal – usul dan/hak tradisonal yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, sudah jelas bahwa desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

Dalam jurnal akuntabilitas sosial pada pemerintahan lokal, juga telah membahas bahwa dalam melaksanakan kepentingan publik, pemerintah berkewajiban memberi pertanggungjawaban terhadap usaha – usaha yang dilakukan dalam pengelolaan aset publik. Pertanggungjawaban ini berupa akuntabilitas, ini bermakna bahwa pemerintah yang mampu bertanggungjawab atas tugasnya merupakan pemerintah yang akuntabel. Akuntabilitas menjadi cara dan tujuan yang ingin dicapai. Tidak terpenuhinya prinsip

pertanggungjawaban pada masyarakat ini mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak akuntabel (Wulandari, 2015). Masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, pergantian jabatan dan sebagainya.

Rendahnya akuntabilitas pemerintah inilah yang mendorong masyarakat melakukan perpindahan untuk peningkatan akuntabilitas, tuntutan dari masyarakat ini yang menciptakan akuntabilitas sosial yaitu, akuntabilitas yang didasarkan oleh masyarakat (malena et al, 2004). Menurut Waluyo (dalam Astuty dan Fanida, 2006 ) Desa juga dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, agar tercapai semua rencana yang telah disusun dalam perencanaan tersebut, dengan adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah desa maka akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat juga memberikan dampak yang positif bagi pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan prinsip tersebut ditemukan bahwa, di Desa Caturtunggal yang merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Sleman Provinsi DIY yang memiliki penduduk yang telah mencapai 43.840 jiwa (informasi kependudukan Desa Caturtunggal) dengan kondisi dan karakteristik yang berbeda, mengakibatkan timbulnya permasalahan. Salah satunya adalah masalah mekanisme akuntabilitas, adanya keluhan dari masyarakat terhadap kurangnya kualitas mekanisme akuntabilitas merupakan salah satu indikator yang menunjukkan belum memadainya aparatur pemerintahan yang akuntabel.

Sehingga pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan masyarakat, sebagaimana telah dipaparkan dalam surat terbuka oleh *jogja-solo pos*, dimana beredar kabar terkait keluhan masyarakat kelurahan Caturtunggal terhadap mekanisme laporan pertanggungjawaban yang diberikan aparatur

pemerintah desa, masyarakat mengeluhkan mengenai laporan pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Dalam surat terbuka tersebut berisi aspirasi dari masyarakat Desa Caturtunggal yang mengutarakan terkait dibenahinya mekanisme laporan pertanggungjawaban yang ada. Selain itu juga, masyarakat ingin aparat pemerintah Desa Caturtunggal untuk lebih transparan dan terbuka terhadap masyarakatnya (Jogja-solo pos, Selasa 9 Oktober 2017). Dalam hal ini Desa Caturtunggal memiliki kewenangan yang sama dengan desa lainnya dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Dalam hal ini pemerintah desa sudah menjalankan beberapa prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, akan tetapi memang masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan prinsip tersebut yang sudah ditetapkan (Kirwanto, wawancara 15 Oktober 2018, pukul 09.10. WIB). Berdasarkan wawancara pra penelitian, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan mekanisme akuntabilitas di Desa Caturtunggal berjalan dengan baik. Penyampaian informasi oleh pemerintah desa tidak selalu berjalan dengan keadaannya formal dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku yang kaku.

Dalam pembahasannya tidak jarang pemerintah desa menggunakan cara-cara informal yang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada, seperti melalui penyelenggaraan pertemuan di malam-malam tertentu yang dianggap memiliki nilai khusus dimasyarakat dan pertemuan dengan komunitas (Kirwanto, wawancara, 15 oktober 2018, pukul 09.10 WIB). Kemudian dalam pelaksanaan resapan aspirasi masyarakat/ jaringan aspirasi masyarakat pemerintah Desa Caturtunggal cukup baik. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kirwanto selaku kepala seksi pelayanan kebudayaan, pemerintah Desa Caturtunggal dalam menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban menggunakan beberapa metode, seperti rapat rutin yang

diselenggarakan. Musyarwarah perencanaan pembangunan desa dan padukuhan(musrenbangDes), *public hearing*, papan informasi, perkumpulan antar komunitas serta perkumpulan dengan masyarakat desa dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat melalui rapat bersama kepala desa yang telah dijadwalkan sebelumnya, dari data tersebut. pemerintah Desa Caturtunggal diketahui bahwa pemerintah sudah menjalankan pelaksanaan fungsi penyaluran aspirasi dan penampungan aspirasi masyarakat dengan baik.

Kemudian dalam menjalankan fungsi pelaporan pertanggungjawaban, pemerintah desa belum menjalankan fungsinya secara maksimal, diketahui bahwa kendala ada di pelaporan SPJ, dimana kurangnya pemahaman sumber daya masyarakat mengenai pentingnya pembuatan laporan pertanggungjawaban sebuah program, yang menjadi kendala pemerintah desa selama ini. Hal ini otomatis menyebabkan banyaknya keluhan mengenai suatu system yang baik. diketahui bahwa pada saat pelaksanaan program diawal maupun diakhir pelaksanaan terhadap suatu program harus melalui pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dimana dengan adanya akuntabilitas akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan melalui akuntabilitas bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Adapun kendala lainya sulitnya merubah pola pikir masyarakat yang lebih patuh pada adat istiadat dan nilai-nilai kearifan lokal (leluhur) dari pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah karena masyarakat sudah sejak lama dan turun menurun mematuhi prinsip dan nilai tersebut.(Kirwanto, wawancara, 15 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB).

Alasan mendasar mengkaji mekanisme akuntabilitas terdapat dalam Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas yang menjadi pedoman wajib, dan suatu keharusan dimana dijelaskan dalam asas akuntabilitas bahwa setiap hasil akhir hasil akhir kegiatan penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Serta dijelaskan pula dalam akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas dimana pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2009). Adanya mekanisme akuntabilitas diharapkan kinerja pemerintah dapat meningkat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan masalah itu jika dilihat dari posisinya suatu desa memiliki posisi yang penting bagi masyarakat. Dimana desa sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. pemerintah Desa Caturtunggal selaku penjabat desa dituntut untuk akuntabel baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban, dan diketahui bahwa desa sendiri tidak mempunyai mekanisme yang jelas untuk sebuah proses pendekatan terhadap masyarakat hanya dalam bentuk pembuatan laporan, website sementara *impact* terhadap masyarakatnya tidak ada sama sekali masyarakatnya cuek dan tidak peduli dan sementara masyarakat lebih patuh terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang ada dibanding dengan peraturan yang sudah pemerintah tetapkan. Kurangnya kualitas dan pemahaman sumber daya masyarakat dalam pembuatan laporan yang dimiliki Desa Caturtunggal sehingga menjadi faktor penyebab kurangnya akuntabel pemerintah desa. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini mengambil judul “ Mekanisme akuntabilitas sosial berbasis budaya lokal di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Tahun 2017 ?

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme akuntabilitas publik berbasis kearifan lokal di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Tahun 2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme akuntabilitas publik berbasis kearifan lokal di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Sleman.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan akuntabilitas publik.
- b) Menambah pengetahuan tentang akuntabilitas publik dalam kearifan lokal
- c) Mengetahui mekanisme akuntabilitas publik dalam pembangunan berbasis kearifan lokal.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a) Penelitian ini diharapkan menjadi suatu pengetahuan tentang mekanisme akuntabilitas publik kearifan lokal.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya agar lebih peka terhadap masalah-masalah yang timbul dalam mekanisme akuntabilitas publik.
- c) Penelitian ini menjadi gambaran nyata dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Caturtunggal dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan akuntabilitas publik.

## E. Tinjauan pustaka

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini akan memberikan beberapa gambaran kajian terdahulu yang telah diteliti. Berikut sepuluh jurnal penelitian pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Tinjauan Pustaka**

No	Peneliti	Judul	Tahun	Hasil
1	Sangkala Rewa	Akuntabilitas dalam perspektif governance	2015	Dijelaskan dalam bahwa akuntabilitas sering muncul dengan perkembangan orientasi penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berupa mencapai tujuan ekonomi tetapi juga dalam konteks hubungan antara tanggungjawab Negara dengan masyarakat sebagai warga Negara. Dalam konteks hubungan antar Negara dan warga Negara, warga Negara harus ditempatkan tidak

				hanya sebagai konsumen dari produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2	Catur Wulandari, dkk	Akuntabilitas sosial pada pemerintahan lokal (studi terbentuknya akuntabilitas sosial masyarakat kelurahan kalisoro kecamatan tawangmangu)	2015	Dijelaskan dalam jurnalnya bahwa akuntabilitas merupakan sarana dan tujuan yang akan dicapai dalam reformasi administrasi ketika, akuntabilitas tidak berjalan dengan maka masyarakat memiliki kekuasaan untuk memaksakan akuntabilitas. sehingga keperdulian dan kemampuan organisasi diri menumbuhkan kesadaran akan pentingnya masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan (Wahyuningsih, 2016)pembangunan masyarakat dengan ini masyarakat mampu

				terlibat aktif untuk perbaikan kinerja pemerintah maupun membuat pemerintah lebih akuntabel. (wulandari,2015)
3	Rutiana Dwi Wahyuningsih	PATOLOGIAKUN TABILITAS SOSIAL (Studi Kasus dalam Proses Perencanaan Penganggaran Daerah di Kota Surakarta dan Kota Magelang )	2016	Disertasi ini menjelaskan mengapa terjadi patologi akuntabilitas sosial dalam proses perencanaan dan penganggaran publik Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa akuntabilitas sosial merekpresentasikan praktik demokrasi untuk menghasilkan tata penganggaran publik lebih transparan, memberdayakan partisipasi, dan kontrol masyarakat sipil sehingga anggaran lebih pro rakyat dan mengurangi perilaku korupsi, kolusi, dan

				<p>nepotisme (KKN). Terjadinya KKN di era penerapan mekanisme akuntabilitas sosial merefleksikan adanya gangguan (patologi) akuntabilitas. Hasil penelitian menemukan patologi akuntabilitas sosial terjadi karena paradoks demokrasi dan paradoks birokrasi menurunkan patologi pada interaksi antarelemen akuntabilitas sosial yang berlangsung dalam lingkungan budaya formalitas prosedural dan masyarakat sipil yang berorientasi komodifikasi. Pintu masuk patologi akuntabilitas sosial adalah melalui elemen akuntabilitas sosial berikut. (1) Supply side, yaitu peran pemerintah (dan</p>
--	--	--	--	---

				<p>politisi) sebagai accountor yang melakukan kooptasi, (2) demand side, yaitu peran masyarakat sipil sebagai accountee, terkooptasi dan melakukan komodifikasi forum, (3) kelembagaan forum warga yang terkooptasi dan dikomodifikasikan, serta (4) keterbukaan informasi yang bias dan dikomodifikasikan. Kesimpulannya adalah orientasi budaya formalitas prosedural dan budaya komodifikasi memicu terjadinya patologi akuntabilitas sosial penganggaran daerah, sehingga mekanisme akuntabilitas sosial yang diselenggarakan dalam format demokratis belum tentu menghasilkan</p>
--	--	--	--	--

				<p>nilai-nilai demokratisasi penganggaran yang lebih baik.</p>
4	<p>Indah Khuriyati</p>	<p>Akuntabilitas Sosial dalam Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>2016(Khuriyati, 2016)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan Akuntabilitas pengelolaan dana desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang sudah dilakukan berdasarkan unsur indikator adanya masyarakat yang terorganisir dan berkemampuan, pemerintahan yang responsif, kesesuaian budaya dan konteks serta akses terhadap informasi. Namun dalam Kendala Adminratif masih ada hal ini dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian anggaran dana desa untuk pemberdayaan kegiatan TPA, dan pembinaan karang taruna tidak benar-</p>

				<p>benar disalurkan dengan tepat. Solusi yang telah dilakukan adalah PTPKD agar membuat daftar rincian dan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai tidak disalurnya dana anggaran pemberdayaan TPA dan pembinaan karang taruna.</p>
5	Oksilawati	Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus: desa bance )	2015	<p>Hasil penelitian ini menyatakan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa bance sudah baik. Dimana pada tahap perencanaan di desa bance pihak aparaturnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Pada tahap</p>

				<p>pelaksanaan pihak aparaturnya memberikan pemberitahuan kepada masyarakat desa melalui papan informasi dimana program itu dilaksanakan. Sedangkan tahap pertanggungjawaban yakni berupa laporan yang petunjuk teknisnya ditentukan oleh pemerintah kabupaten. (Oksilawati, 2015)</p>
6	Aini	Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di wilayah kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan tahun 2013-2014	2015	<p>dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa untuk akuntabilitas alokasi dana desa pada kedua desa tersebut terhadap masyarakat juga sudah dapat terlaksana dengan baik. Dalam proses pembuatan keputusan dalam alokasi dana desa yang dibuat secara tertulis dan tersedia bagi warga</p>

				yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang sudah diambil memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, sesuai prinsip administrasi yang benar. (aini, 2105)
7	Elga astuty	Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). (study pada alokasi dana desa anggaran tahun 2011 di desa sareng kecamatan geger kabupaten madiun	2013	Hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa dalam alokasi dana desa di desa sareng secara administratif sudah baik. Terbukti dari surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat dalam tahap II menjadi aturan dalam peraturan Bupati Nomor 8 tahun 201. SPJ sudah lengkap dan menjadi acuan untuk memperoleh ADD tahun berikutnya. Namun dalam program

				<p>posyandu lansia masih terjadi kendala , kendala terutama adalah rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut dan pengalihan dana posyandu tanpa adanya bukti kuitansi dalam SPJ. Sehingga masih memerlukan perbaikan secara teknis dalam pengelolaan ADD tahun berikutnya. (astuty,2013)</p>
8	Husin Sulmin	Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintah desa di kabupaten Doggola	2015	<p>Mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan Desa dalam penggunaan alokasi dana Desa dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta diakhiri oleh pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa pada pemerintahan Desa di</p>

			<p>kabupaten Donggala telah dilaksanakan dengan baik oleh pengelola anggaran sesuai dengan hukum administrasi penyelenggaraan pemerintahan, aparat yang mengelola yang telah memahami tata kelola keuangan negara yang perlu adanya pertanggungjawaban.</p> <p>2. Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana Desa oleh pemerintah Kabupaten dilaksanakan secara berjenjang dari pemberdayaan pengawasan internal di Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten</p>
--	--	--	--

				dilakukan melalui pengawasan melekat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (sulmin,2015)
9	Paulus israwan setyoko	Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD).	2011	Untuk meningkatkan keberhasilan Program ADD, maupun program pembangunan perDesaan lainnya, peningkatan kemampuan administratif aparat pemerintah Desa, tersedianya system sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran, dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengawasan keuangan sangat di butuhkan. Peningkatan kemampuan administrative ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis terkait dengan system dan

				<p>mekanisme pelaksanaan program, serta pendampingan oleh pemerintah kabupaten. Guna meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah Desa dalam membuat laporan keuangan, ketersediaan mekanisme sanksi yang jelas dan tegas sangat diperlukan. ketersediaan mekanisme sanksi ini dapat berbentuk sanksi administrative maupun sanksi hukum, sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan Negara. Sedangkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat perDesaan terhadap persoalan akunabilitas publik, BPD Sebagai lembaga masyarakat perDesaan perlu lebih</p>
--	--	--	--	---

				difungsikan sebagai forum pengawasaan pembangunan Desa. (setyoko,2011)
10	Ade Irma	akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa (add) dikecamatan dolo selatan kabupaten sigi	2015	Masih ditemukan cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa di Kecamatan Dolo Selatan telah nampak dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat terlihat dari kemampuan masyarakat Desa dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam kehidupannya baik kebutuhan untuk kelangsungan hidup perorangan, keluarga

				dan kemasyarakatan. (Irma,2015)
--	--	--	--	------------------------------------

Sumber : dibuat oleh peneliti (2018)

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan tersebut terdapat pada pengkajian topik yang sama tentang akuntabilitas sosial, seperti pada penelitian Catur Wulandari dengan judul Akuntabilitas Sosial pada Pemerintahan Lokal di Kalisoro (2015), terdapat persamaan yaitu menjelaskan bentuk akuntabilitas sosial dalam upaya peningkatan pemerintahan lokal dan faktor-faktor penghambat akuntabilitas sosial. Pada penelitian Indah Khuriyati (2016) persamaan terdapat dari tujuan penelitian ini yaitu, mendeskripsikan secara mendalam bentuk akuntabilitas sosial. Dalam penelitian ini adalah akuntabilitas sosial dalam pengelolaan Dana Desa dan perbedaan dalam penelitian ini lebih fokus untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan akuntabilitas sosial dalam pengelolaan dana desa. Dilihat secara keseluruhan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada pengkajian topik mengenai akuntabilitas sosial yang lebih fokus pada penjelasan bentuk akuntabilitas sosial yang di lakukan pada masing-masing penelitian.

Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini cenderung membahas tentang bagaimana mekanisme akuntabilitas secara horizontal dimana sebuah pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat luas mengenai sebuah program yang telah berjalan atau kegiatan, yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Caturtunggal sebagai bentuk akuntabilitas sosial, selain itu lokasi penelitian, bidang study, serta hasil penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dibahas. Perbedaannya juga terletak pada metode pengumpulan datanya, dalam teknik pengumpulan data menggunakan metode

penelitian kualitatif , dalam hal ini penelitiannya mendeskripsikan bentuk akuntabilitas, faktor yang menghambat mekanisme akuntabilitas sosial.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Teori Akuntabilitas**

#### **a. Pengertian Akuntabilitas**

Teori Akuntabilitas Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Terdapat berbagai definisi tentang akuntabilitas, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Sjahrudin Rasul (2000) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.

2. J.B. Ghartey (1998) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan.

3. Ledvina V. Carino (2002) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kewenangannya. Setiap orang harus benar-benar menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja. Akan tetapi, ia harus menyadari bahwa tindakannya juga akan membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah harus memperhatikan lingkungannya.

4. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

5. Akuntabilitas juga dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Dalam konteks ini, pengertian akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolak ukur pengukuran kinerja.

Polidano (1998) menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung.

Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggung jawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggung jawaban vertikal melalui rantai komando tertentu. Polidano lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu:

1. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku para birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing).

2. Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru. Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru.

3. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal

seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok penekan.

Aspek subyektivitas dalam proses peninjauan ulang itu seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya. Setiap organisasi menginginkan terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dengan berbagai cara dalam memenuhi tuntutan lingkungannya. Untuk memenuhi lingkungan berarti perlu adanya upaya organisasi untuk dapat menggunakan dukungan kemampuan dan memperhatikan kelemahan untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang kompleks. Keberadaan organisasi salah satunya tergantung akuntabilitasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Istilah akuntabilitas tidak terlepas dari istilah akunting ataupun akuntansi yang mempunyai makna laporan, pertanggungjawaban, perhitungan/nilai.

Pengukuran nilai agak menjadi perhatian dalam akuntabilitas dikarenakan didasari oleh sistem akuntansi (Walters, Aydelotte, Miller, 2010). Dalam pemahaman selanjutnya, akuntabilitas dikaitkan dengan sikap anggota organisasi didalam melaksanakan tugasnya, dengan memperhatikan keberlangsungan organisasi di dalam melaksanakan tugasnya, dengan memperhatikan keberlangsungan organisasi dalam menghadapi persaingan dengan organisasi lain ke depan, dengan tidak mengurangi perjalanan sejarah dan organisasi tersebut. Hal ini menjadi menarik dimana akuntabilitas yang dapat dipercaya untuk membantu revitalisasi, memberi kekuatan bersaing, memperbaiki kualitas produk dan produk pelayanan perusahaan. Akan meningkatkan reaksi organisasi terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan atau pemilih, mengurangi penyalahgunaan/penyimpangan (Bachtiar Arif, 2008).

Akuntabilitas merupakan sikap yang berkelanjutan untuk bertanya apa yang dapat diperbuat untuk membangkitkan keadaan dan hasrat/menginginkan pencapaian prestasi hasil. Ini merupakan proses tindakan melihat, mendapatkan sesuatu, memecahkan sesuatu, dan yang harus dikerjakan ini merupakan tingkatan kepemilikan termasuk di dalamnya pembuatan, pemeliharaan/ penyimpanan dan secara proaktif menjawab untuk janji secara personal. Merupakan pandangan ke depan yang mencakup kedua keadaan sekarang dan usaha masa depan daripada reaksi dan penjelasan tentang sejarah masa lalu (Bachtiar Arif, 2008). Pendapat lain yang menitikberatkan akuntabilitas sebagai kewajiban pada pegawai, akuntabilitas adalah kewajiban dari pegawai untuk memberikan seluruh unsur/element yang merupakan nilai kompensasi yang diberikan dan juga kewajiban untuk membuat pernyataan/janji keluaran yang spesifik dengan tidak mengejutkan. Terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang sebagai jawaban ketika ada permintaan dari pihak lain tentang pencapaian sesuatu dan pelaporan balik (memberitahukan) hasil pencapaian tersebut dengan menjelaskan bagaimana menyelenggarakan atau melaksanakannya. Tampak adanya kegiatan yang dilakukan. dalam penyelenggaraan dan hasil akhir yang ingin diketahui. Hal tersebut menunjukkan dapat diketahui bahwa apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakan, dan sampai pada tingkat mana penyelesaian pekerjaan tersebut.

Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain “apa yang harus dipertanggungjawabkan, kepada siapa pertanggungjawaban tersebut diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lainnya

(Lindsay Amiel, 2014). Akuntabilitas yang merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Rentetan kegiatan-kegiatan sejak dari pemahaman tugas dan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian hasil akhir akan mempunyai dampak terhadap kegiatan orang lain. Khususnya pihak-pihak yang memerlukan pelayanan. Untuk itu perlu dicermati kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan seseorang/pejabat tersebut masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada di luar jalur tanggung jawab dan kewenangannya sehingga tingkah laku pejabat perlu memperhatikan lingkungannya. Akuntabilitas dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat sehingga perlu disadari bahwa semua kegiatan organisasi publik dalam memberikan pelayanan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari public (Choirul Saleh, 2012). Akuntabilitas adalah hubungan mendasar antara menunjukkan kewajiban dan keberadaan tanggung jawab untuk mencapai hasil yang sebelumnya ada kesempatan dan harapan.

Setiap dari dalam akuntabilitas untuk keseluruhan kegiatan – termasuk di dalamnya keputusan tidak menerima kegiatan – dalam lingkungan kerja) (Omorie Charles Osifo, 2014) Keterbukaan sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam akuntabilitas, tanpa adanya keterbukaan tidak dapat diketahui oleh pegawai, masyarakat ataupun pelanggan. Hal yang perlu diketahui antara lain: apa yang dilakukan; mengapa dilakukan, bagaimana cara melakukan, bagaimana sebaiknya dilakukan, dan apa yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja/hasil pada waktu berikutnya. Pihak-pihak yang berhubungan adalah siapa yang harus melakukan akuntabilitas dan kepada pihak siapa dia harus

berakuntabilitas. Hasil akan menunjukkan standar-standar tertentu yang digunakan untuk mengukurnya dan nilai terhadap akuntabilitas itu sendiri (Choirul Saleh, 2012).

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan bahwa akuntabilitas bukanlah merupakan suatu konsep yang sederhana. Konsep akuntabilitas menyangkut berbagai pihak yang terkait dengan orang yang mempunyai kewenangan yang lebih tinggi, yang melaksanakan wewenang atau yang berakuntabilitas, dan pelanggan (Omorie Charles Osifo, 2014). Pertanggungjawaban pada dasarnya meliputi penjelasan atau justifikasi tentang apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa rencana yang akan dilakukan. Hal ini sebagai akibat timbul dari adanya prosedur yang dibuat dan hubungan kerja dengan berbagai macam formalitasnya. Oleh karena itu, satu pihak bertanggung jawab kepada pihak lain dalam arti bahwa salah satu pihak dapat meminta penjelasan atau pertanggung-jawaban atas segala tindakan apa yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas mengisyaratkan sebuah kemampuan untuk menjelaskan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan untuk menilai pertanggungjawaban dan memberikan penghargaan atau hukuman. Kesemuanya digunakan untuk mewujudkan harapan-harapan publik (masyarakat) dan standar kinerja untuk menilai/menentukan kinerja, daya tanggap atau bahkan moral organisasi pemerintah (Noah De Lissovoy & Peter McLaren, 2003). Dari berbagai definisi akuntabilitas seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

## **b. Bentuk Akuntabilitas**

Akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat. Kegagalan seseorang untuk memenuhi akuntabilitas eksternal mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepadanya. Akuntabilitas eksternal lebih mudah diukur mengingat norma dan standar yang tersedia memang sudah jelas. Kontrol dan penilaian dari pihak eksternal sudah ada dalam mekanisme yang terbentuk dalam suatu sistem dan prosedur kerja. Akuntabilitas eksternal baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi merupakan hal yang paling banyak dibicarakan dalam konteks akuntabilitas. Akuntabilitas eksternal terdiri dari :

1. Akuntabilitas Eksternal untuk Pelayanan Publik pada Organisasi Sendiri. Dalam akuntabilitas ini, setiap tingkatan pada hierarki organisasi diwajibkan untuk accountable kepada atasannya dan kepada yang mengontrol pekerjaannya. Untuk itu, diperlukan komitmen dari seluruh petugas untuk memenuhi kriteria pengetahuan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan posisi tersebut.

2. Akuntabilitas Eksternal untuk Individu dan Organisasi Pelayanan Publik di luar Organisasi Sendiri. Akuntabilitas ini mengandung pengertian akan kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan wewenang. Untuk itu, selain kebutuhan akan pengetahuan dan keahlian seperti yang disebutkan sebelumnya, juga dibutuhkan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dan program-program yang telah dijanjikan/dipersyaratkan sebelum dia memangku jabatan tersebut.

### **c. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan SAKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.

6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **d. Dimensi Akuntabilitas**

Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu (Syahrudin Rasul, 2002:11):

1. Akuntabilitas Hukum Dan Kejujuran (accuntability for probity and legality)  
Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hokum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas

kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas Manajerial Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas Program Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas Kebijakan Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas financial Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk

membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

#### **e. Aspek-aspek Akuntabilitas**

1. Akuntabilitas Adalah Sebuah Hubungan Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh Auditor General of British Columbia yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.

2. Akuntabilitas Berorientasi Hasil Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada outcome.

3. Akuntabilitas Memerlukan Pelaporan Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas

4. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.

5. Akuntabilitas Meningkatkan Kinerja Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman.

#### **f. Alat-alat Akuntabilitas**

1. Rencana Strategis Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran

tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan suatu organisasi. Manfaat dari Rencana Strategis antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi; menyediakan dasar alokasi sumber daya dan perencanaan operasional; menentukan ukuran untuk mengawasi hasil dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

2. Rencana Kinerja Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan.

3. Kesepakatan Kinerja Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

4. Laporan Akuntabilitas Dipublikasikan tahunan, laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

5. Penilaian Sendiri Adalah proses berjalan dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran capaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu. 6. Penilaian Kinerja Adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama periode review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan

tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

6. Kendali Manajemen Akuntabilitas manajemen adalah harapan bahwa para manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja, meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya dan menekan berbagai aspek negatif kegiatan, dan menjamin bahwa program diatur dengan integritas dan sesuai peraturan yang berlaku.

## **2. Akuntabilitas Publik**

### **a). Pengertian Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut Menurut (Khuriyati, 2016) akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui:

1. Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsive pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan,

2. Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjelaskan, mempertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan atas semua hasil pekerjaan yang ditangguhkan kepadanya. Bagus atau buruknya hasil pekerjaan yang telah diselesaikan seseorang, jika ia mampu menjelaskan, mempertanggungjawabkan dan dapat disalahkan maka pekerja tersebut telah bersikap akuntabel.

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar *good governance* yang merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pihak – pihak yang terkena dampak kebijakan (Bappenas, 2009 ). Secara umum Akuntabilitas Publik dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memberikan pertanggungjwaban yang dilakukan unit organisasi atau pihak yang berkepentingan secara terbuka kepada pihak yang memberikan pertanggungjawaban. Menurut Sulistioni

(2010:3) pemerintah yang akuntabel memiliki ciri sebagai berikut :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, tepat dan cepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah
4. Mampu menjelaskan setiap kebijakan publik secara proposional.

5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan.

#### **b). Prinsip – Prinsip Akuntabilitas Publik**

Prinsip Akuntabilitas menuntut dua hal yaitu kemampuan dalam menjawab, dan konsekuensi. Komponen utama yaitu bermula dari Responibilitas adalah berhubungan dengan tuntutan bagi aparat untuk menjawab setiap periodik dan setiap pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, sumber daya yang telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut (LAN, 2003).

Prinsip – Prinsip Akuntabilitas Publik sebagai berikut :

1. Harus memiliki komitmen untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan agar dapat tercipta akuntabel.
2. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Harus berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi dan manfaat yang diperoleh.
4. Harus jujur, transparan, objektif dan inovatif dalam pengukuran serta penyusunan laporan pertanggungjawaban.
5. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi

yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **C. Jenis – Jenis Akuntabilitas publik**

Menurut Mardiasmo ( 2008 : 21) akuntabilitas terdiri dari beberapa macam yaitu :

- a) Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*)
- b) Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*)

Adapun penjelasan dari jenis – jenis akuntabilitas adalah sebagai berikut :

#### **1. Akuntabilitas Vertikal ( Internal )**

Setiap pejabat atau petugas publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodic maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.

#### **2. Akuntabilitas Horizontal ( Eksternal )**

Akuntabilitas horizontal melekat pada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal ( masyarakat luas ) dan lingkungannya.

### **d. Pelaksanaan Akuntabilitas publik**

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban

kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertical (vertical accountabilit) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002:21).

#### **e). Model-Model Pertanggungjawaban/ Akuntabilitas**

Menurut Lalolo (2003), indikator akuntabilitas , yaitu:

- 1) Proses pembuatan keputusan tertulis memenuhi standar etika dan berlaku sesuai prinsip administrasi yang benar.
- 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- 3) Kejelasan sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan kelayakan tersebut.
- 4) Penyebarluasan informasi suatu keputusan melalui media masa.
- 5) Pembukaan akses public pada informasi keputusan dan mekanisme pengaduan.
- 6) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah:

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
  - a) Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.

b) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakekolders.

c) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.

d) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:

a) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.

b) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara mencapai sasaran suatu program.

c) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

d) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

#### **f). Indikator Akuntabilitas**

Menurut Dadang Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan

2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan

3. Adanya output dan outcome yang terukur

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Adanya Standart Operating Procedure dalam
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau
3. Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan
4. Mekanisme pertanggungjawaban
5. Laporan tahunan
6. Laporan pertanggungjawaban
7. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
8. Sistem pengawasan
9. Mekanisme reward and punishment

Menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003:17) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka
4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

Disebutkan oleh Jay M. Shafritz & E.W. Russel (1997:368), indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku.

2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan caracara mencapai sasaran suatu program
3. Kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai
4. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional
5. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. Di akses dari [www.akuntabilitas\\_keuangan.com](http://www.akuntabilitas_keuangan.com) Diunggah pada kamis, 23 januari 2019 pkl 10.00 wib)

Sedangkan menurut Dadang Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu:

- 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;
- 2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Adanya output dan outcome yang terukur. Perangkat Indikator Akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:
  - a) Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam
  - b) penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam
  - c) penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan;
  - d) Mekanisme pertanggungjawaban;
  - e) Laporan tahunan;
  - f) Laporan pertanggungjawaban;
  - g) Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;
  - h) Sistem pengawasan;
  - i) Mekanisme reward and punishment.

Menurut Teguh Kurniawan bahwa akuntabilitas sebagai pengaturan institusi terdiri dari empat elemen antara lain:

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang diberikan.
2. Penjelasan dan Pembeneran terhadap tindakan yang dilakukan
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum yang spesifik
4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir. Berdasarkan indikator-indikator di atas maka dapat ditarik kesimpulan tentang indikator proses pertanggungjawaban/akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme pertanggungjawaban
- 2 Laporan Pertanggungjawaban
3. Adanya akses Publik terhadap laporan yang diberikan
4. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum yang spesifik
5. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir

Menurut Mardiasmo (2009:63), anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi, dan (8) alat menciptakan ruang publik. Bastian dalam Herawati (2011), penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan: (1) berdasarkan program, (2) berdasarkan pusat pertanggungjawaban dan (3) sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap - tahap sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan stratejik.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan, Haspiarti (2012).

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, Riantiarno & Azlina (2011). Menurut Sulistoni, G (2003) pemerintahan yang accountable memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat,
2. mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik,
3. mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan,
4. mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan

5. adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Disamping itu pola pertanggungjawaban (akuntabilitas)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2007).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan

untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (LAN, 2000).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (Pasal 1), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya. Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan-badan usaha milik daerah (Halim, 2007).

### **3. Pembangunan**

#### **a. Konsep Pembangunan**

Pembangunan Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian

ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11) Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. 10 Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi.

Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat,dkk: 2011:3) Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu

diupayakan untuk mencapainya. (Subandi: 2011:13) Selanjutnya Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu

- a. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs),
- b. Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan
- c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude).

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Untuk mencapai “kehidupan yang serba lebih baik” semua masyarakat minimal harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut (Todaro, 2000: 28) :

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok , seperti pangan , sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.

- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil , melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan

ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara, bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

#### **4. Kearifan Lokal**

##### **a. Definisi Kearifan Lokal**

Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap atau bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain yang menjadi watak dan kemampuan sendiri (Wibowo,2015:17). Identitas dan kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan pandangan hidup masyarakat agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai. Kearifan lokal adalah salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik. Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa *local wisdom* (kearifan lokal ) dapat dipahami sebagai gagasan – gagasan *local* yang berarti bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Kearifan lokal menurut (Ratna,2011:94) adalah sebagai semen pengikat dalam bentuk kebudayaan yang sudah ada didasari oleh keberadaan. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui internalisasi dan interpretasi jajaran agama dan budaya yang disosialkan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.

Definisi kearifan lokal tersebut paling tidak menyiratkan beberapa konsep yaitu:

- a). Kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang , yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seseorang.

- b). Kearifan lokal tidak terlepas dari lingkungan pemiliknya dan
- c). Kearifan lokal bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya.

Konsep demikian juga sekaligus memberikan gambaran bahwa kearifan lokal juga selalu terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungannya. Kearifan lokal muncul sebagai penjaga atau filter dari iklim global yang melanda kehidupan manusia. Kearifan lokal adalah bagian dari budaya. Kearifan lokal Jawa tentu bagian dari budaya Jawa yang memiliki pandangan tertentu. Kearifan lokal adalah proses dari produk manusia, dimanfaatkan untuk mempertahankan hidup. Berdasarkan pengertian di atas dapat dipertegas bahwa kearifan lokal merupakan sebuah budaya kontekstual. Kearifan lokal selalu bersumber dari hidup manusia ketika hidup itu berubah, kearifan lokal pun akan berubah pula.

#### **b. Ruang Lingkup Kearifan Lokal**

Kearifan lokal merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. Cakupan kearifan lokal cukup banyak sehingga tidak bisa dibatasi dengan ruang. Kearifan tradisional dengan kearifan kini berbeda dengan kearifan lokal. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut sehingga tidak harus merupakan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal bisa merupakan kearifan yang muncul dalam suatu komunitas sebagai hasil interaksinya dengan masyarakat dengan budaya lain. Oleh karena itu, kearifan lokal tidak selalu bersifat tradisional karena, dapat mencakup kearifan masa kini, dan karena itu pula lebih luas maknanya dari pada kearifan tradisional.

Berdasarkan waktu permunculan tersebut, akan hadir kearifan dalam kategori yang beraga. Paling tidak terdapat dua jenis kearifan lokal yaitu : a) kearifan lokal klasik, lama, tradisional dan b) kearifan lokal baru, masa kini dan kontemporer. Kategori semacam ini mencakup berbagai hal maksudnya, istilah lama dan baru itu sering kali berubah-ubah.

Dari sisi filosofi dasarnya, kearifan dapat dikategorikan dalam dua aspek, yaitu: (a) gagasan, pemikiran, akal budi yang bersifat abstrak; dan (b) kearifan lokal yang berupa hal-hal konkret, dapat dilihat. Kearifan lokal kategori (a) mencakup berbagai pengetahuan, pandangan, nilai serta praktik-praktik dari sebuah komunitas baik yang diperoleh dari generasi sebelumnya dari komunitas tersebut maupun yang didapat oleh komunitas tersebut di masa kini, yang tidak berasal dari generasi sebelumnya, tetapi dari berbagai pengalaman di masa kini, termasuk juga dari kontaknya dengan masyarakat atau budaya lain.

Kearifan lokal kategori (b) biasanya berupa benda-benda artefak, yang menghiasi hidup manusia, dan bermakna simbolik. Kearifan dapat muncul pada: (a) pemikiran, (b) sikap, dan (c) perilaku. Ketiganya hampir sulit dipisahkan jika ketiganya ada sebuah ketimpangan, maka kearifan lokal tersebut semakin memudar. cakupan luas kearifan lokal dapat meliputi: (a) pemikiran, sikap, dan tindakan berbahasa, berolah seni, dan bersastra, misalnya karya-karya sastra yang bernuansa filsafat dan niti (wulang); (b) pemikiran, sikap, dan tindakan dalam berbagai artefak budaya, misalnya keris, candi, dekorasi, lukisan, dan sebagainya; dan (c) pemikiran, sikap, dan tindakan sosial bermasyarakat, seperti unggah-ungguh, sopan santun, dan udanegara. Secara

garis besar, kearifan lokal terdiri dari hal-hal yang tidak kasat mata (intangible) dan hal-hal yang kasat mata (tangible).

Kearifan yang tidak kasat mata berupa gagasan mulia untuk membangun diri, menyiapkan hidup lebih bijaksana, dan berkarakter mulia. Sebaliknya, kearifan yang berupa hal-hal fisik dan simbolik patut ditafsirkan kembali agar mudah diimplementasikan ke dalam kehidupan. *Local Wisdom* dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu makanan, pengobatan, teknik produksi, industri rumah tangga, dan pakaian. Klasifikasi ini tentu saja tidak tepat sebab masih banyak hal lain yang mungkin jauh lebih penting. Oleh sebab itu, kearifan lokal tidak dapat dibatasi atau dikotak-kotak.

Kategorisasi lebih kompleks dikemukakan Sungri (Wagiran, 2014) yang meliputi pertanian, kerajinan tangan, pengobatan herbal, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, perdagangan, seni budaya, bahasa daerah, filosofi, agama dan budaya serta makanan tradisional. Dalam lingkup budaya, dimensi fisik dari kearifan lokal meliputi aspek: (1) upacara adat, (2) cagar budaya, (3) pariwisata alam, (4) transportasi tradisional, (5) permainan tradisional, (6) prasarana budaya, (7) pakaian adat, (8) warisan budaya, (9) museum, (10) lembaga budaya, (11) kesenian, (12) desa budaya, (13) kesenian dan kerajinan, (14) cerita rakyat, (15) dolanan anak, dan (16) wayang.

Sumber kearifan lokal yang lain dapat berupa lingkaran hidup orang Jawa yang meliputi: upacara tingkeban, upacara kelahiran, sunatan, perkawinan, dan kematian. Kearifan lokal merupakan modal pembentukan karakter luhur. Karakter luhur adalah watak bangsa yang senantiasa bertindak dengan penuh kesadaran, purba diri, dan pengendalian diri

### **c. Bentuk – bentuk kearifan lokal**

Dalam Haryanto (2014 :212) menyatakan bahwa bentuk – bentuk kearifan lokal adalah kerukunan beragaman dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan –aturan lainnya). Nilai-nilai luhur terkait dengan kearifan lokal meliputi bentuk cinta kepada Tuhan, alam beserta isinya, Tanggung jawab, disiplin, mandiri, kreatif, pantang menyerah dan lain-lainnya.

Hal hampir serupa dikemukakan oleh Wahyudi (2014: 13) kearifan lokal merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan, berupa Tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, misalnya dalam interaksi sosial baik antar individu maupun kelompok, yang berkaitan dengan hirarkhi dalam pemerintahan dan adat, aturan perkawinan antar klan, tata karma dalam kehidupan sehari-hari. Tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang, tumbuh-tumbuhan yang lebih bertujuan pada upaya konservasi alam. Tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang gaib, misalnya Tuhan dan rohroh gaib. Kearifan lokal dapat berupa adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, pepatah (Jawa: parian, paribasan, bebasan dan saloka).

### **G. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan suatu pengertian dari segala yang menjadi pokok perhatian atau penelitian. Definisi inti ditunjukkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan istilah dalam pokok permasalahan.

### 1. Akuntabilitas

akuntabilitas adalah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seorang / badan hukum suatu organisasi kepada pihak yang berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang muncul dari paradigma *governance*. Dimana dalam konsep tersebut peran masyarakat menjadi faktor penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

### 2. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses tanpa akhir dan prosesnya dilakukan secara berencana dan perencanaanya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan yang mengarah ke modernitas.

### 3. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah suatu budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui internalisasi dan interpretasi jajaran agama dan budaya yang disosialkan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.

## **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan unsur penting dalam penelitian yang memberikan informasi tentang pengukuran variable penelitian. Adapun definisi operasional penyusunan skripsi mengenai mekanisme akuntabilitas pemerintah desa berbasis budaya lokal di Desa Caturtunggal sebagai berikut :

### **Tabel 1.2**

#### **Definisi Operasional**

No	Variabel	Indikator
1.	Kemampuan Kepala Desa dalam menempatkan sebagai warga Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepemimpinan</li> <li>b. Pelayanan sosial</li> <li>c. Pelayanan administratif</li> <li>d. Transparansi</li> </ul>
2.	Mampu mengelola informasi dan menyampaikan ke ranah publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Insidental</li> <li>b. Manajemen keluhan</li> </ul>
3	Sinergitas masyarakat dalam akuntabilitas sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tokoh masyarakat</li> <li>b. Karang taruna</li> <li>c. RT dan RW</li> </ul>
4	Respon pemerintah dan mekanisme yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Respon positif</li> <li>b. Respon kebijakan</li> </ul>

## I. Metode penelitian

### 1. Jenis penelitian

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013:15) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian deskriptif, menurut Sukmadinata, N. S. (2007:6) metode deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan

untuk mendeskripsikan yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian mekanisme akuntabilitas sosial berbasis kearifan lokal merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji tentang bagaimana mekanisme akuntabilitas sosial berbasis kearifan lokal di Desa Caturtunggal tahun 2017.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Alasan dalam pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Desa Caturtunggal merupakan desa di Kabupaten Sleman yang merupakan desa dalam pelaksanaan fungsi pelaporan pertanggungjawaban belum berjalan dengan baik. Hal ini menjadikan fungsi laporan pertanggungjawaban dirasa sangat strategis untuk diteliti karena diharapkan laporan pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik.

## **3. Unit Analisis Data**

Menurut Krippendorff(2007) dalam (Tanjung:2018) unit analisis merupakan bagian yang diobservasikan, dicatat dan dianggap sebagai data, memisahkan menurut batas-batasnya dan mengidentifikasikan untuk analisis. Unit analisis adalah dari bagian yang di isi dan akan diteliti lebih lanjut lagi yang kemudian akan disederhanakan. Maka unit analisis dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Caturtunggal, Kepala seksi pelayanan.

## **4. Jenis Data**

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan data primer juga data sekunder dikarenakan data primer digunakan sebagai data terbaru yang akan dibandingkan dengan data sekunder mengenai hasil penelitian yang sama yang diteliti oleh orang lain.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014:225). Sumber data primer ini di dapatkan dengan cara wawancara kepada narasumber yang memiliki fokus permasalahan yang sesuai dengan topik penelitian. Data primer dilakukan dengan melakukan wawancara kepala seksi pelayanan umum.

**Tabel 1.3**  
**Data Primer Penelitian**

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
b. Mekanisme akuntabilitas sosial	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Wawancara
Data Proses akuntabilitas sosial	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Wawancara
Faktor akuntabilitas sosial	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Wawancara

sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui laporan-laporan, buku-buku/ catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan mekanisme

akuntabilitas sosial. Dokumen sebagai sumber data lain yang menunjang data utama yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian antara lain meliputi ketentuan landasan hukum atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan mekanisme akuntabilitas sosial. Serta dokumen-dokumen yang meliputi dalam inovasi pelayanan publik.

**Tabel 1.4**  
**Data Sekunder Penelitian**

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Undang – Undang terkait dengan akuntabilitas	Desa Caturtunggal	Dokumentasi
Laporan pertanggungjawaban program atau kegiatan	Desa Caturtunggal	Dokumentasi

*Sumber : diolah dari berbagai sumber*

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan berbagai sumber data untuk mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang harus menemukan data yang akurat, jelas dan spesifik. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara,

dokumentasi dan gabungan / triangulasi. Pada penelitian ini penelitian menggunakan metode wawancara dan dilengkapi dengan dokumentasi setiap pelaksanaan penelitian

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang akan memberikan jawaban pewawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dengan melaksanakan teknik wawancara yang cermat maka akan di dapatkan data yang jelas dan spesifik karena mampu menggali seluruh informasi yang kita akan tanyakan berdasarkan indikator-indikator penelitian.

**Tabel 1.5**

**Data Narasumber Wawancara**

<b>No</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Instansi</b>
1.	Agus Santoso	Kepala Desa Caturtunggal	Kantor Desa Caturtunggal
2.	H.Amanudin Aziz	Sekretaris Desa Caturtunggal	Kantor Desa Caturtunggal
3.	Danang Setiawan	Ketua Karang Taruna	Karang Taruna Padukuhan

4.	H.Abdul bari	Tokoh masyarakat	Tokoh Masyarakat Desa Caturtunggal
5.	Kirwanto	Kepala Seksi Pelayanan	Kantor Desa Caturtunggal

## 2.Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti dapat mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012:240). Dengan demikian dokumentasi juga dimasukkan dalam salah satu teknik pengumpulan data penelitian, dimana teknik dokumentasi ini akan dapat mengabadikan setiap momen penelitian, yang nantinya data dalam dokumentasi akan menjadi salah satu data hasil penelitiannya di lapangan.

Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan digunakan meliputi :adalah berwujud foto, laporan, surat-surat, catatan harian, dan sebagainya. Hal mendasar dari data ini tak terbatas pada waktu dan ruang sehingga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di era sebelumnya. Lebih jelasnya, bahan documenter terbagi dari buku, surat-surat pribadi atau memorial , catatan harian , dokumen pemerintah atau swasta, data tersimpan di *website*, data di *server* dan lain-lain .

**Tabel 1.6**  
**Data Dokumentasi**

No	Nama Data	Sumber Data
1.	Data anggaran pembangunan non fisik Desa Caturtunggal 2017	Arsip Desa Caturtunggal
2.	Data Pelayanan Administrasi 2017	Arsip Desa Caturtunggal

*Sumber: diolah dari berbagai sumber*

### **6. Teknis analisis data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data. Miles dan huberman (Sugiyono, 2007) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti interview, observasi, kutipan dan dokumen, catatan-catatan melalui tape. Terlihat lebih banyak berupa kata-kata dari pada angka. Karena itu, data tersebut “diproses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Dalam penelitian tentang mekanisme akuntabilitas sosial, penulis melakukan tahapan yang akan mempermudah dalam menyusun penelitian. Tahapan tersebut sebagai berikut :

1. Menyusun permasalahan secara sistematis, permasalahan yang ditemukan oleh penulis akan dikumpulkan dan disusun secara urut dan sistematis agar memberikan kemudahan dalam pembahasan. Pembahasan meliputi latar

belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan lain-lainnya.

2. Tahapan dilanjutkan dengan penyusunan tentang kerangka teori, dalam kerangka teori memberikan pembahasan terkait dengan teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Dengan pembahasan kerangka teori tersebut harus menjelaskan mengenai mekanisme akuntabilitas sosial.
3. Selanjutnya penyusunan instrumen penelitian, dalam tahapan ini sangat penting diperhatikan karena penulis mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Pengolahan data terhadap permasalahan serta mempermudah arah terhadap penulis dalam penelitiannya.
4. Tahapan selanjutnya mengenai penulis untuk mengumpulkan data primer dengan *interview* dan mengumpulkan data sekunder. Penulis selanjutnya melaksanakan *interview* untuk mendapatkan data mengenai mekanisme akuntabilitas sosial dengan data sekunder sebagai acuan penelitian.
5. Saat akan melakukan tahapan pengolahan data, penulis harus memiliki data primer dan sekunder lengkap. Sehingga dalam analisis data penulis mendapatkan jawaban atas data yang sudah tersusun dari awal sehingga penelitiannya dapat bermanfaat bagi pembaca.
6. Analisis data merupakan tahapan untuk menganalisis, mempertajam, memilih, mengfokuskan, membuang data dalam satu acara demi mendapatkan data reduksi yang mengerucu. Dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

7. Display data dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau, dalam penelitian ini menggunakan display data yang berasal dari Desa Caturtunggal.
8. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain, perlu juga untuk diingat bahwa menambah data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data display data dan penarikan kesimpulan berikutnya. Kesimpulan dapat memberikan penjelasan tentang mekanisme akuntabilitas sosial.

